

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bojongloa Kaler selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi,

misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung yang diresmikan pada tanggal 12 April 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Jend. Sudirman (Kec. Andir);
- Sebelah Timur : Jl. Kopo (Kec. Bojongloa Kidul);
- Sebelah Selatan : Jl. Soekarno Hatta (Kec. Babakan Ciparay);
- Sebelah Barat : Jl. Situ Gunting (Kec. Babakan Ciparay)

Secara geografis Kecamatan Bojongloa Kaler terletak disebelah Timur Kota Bandung dengan luas wilayah 303,4 ha. dengan kepadatan penduduk rata-rata 398 jiwa per ha. Wilayah Kecamatan terbagi dalam 5 kelurahan, 47 rukun warga dan 395 rukun tetangga.

Adapun kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler adalah sebagai berikut :

- 1) Kelurahan Kopo
- 2) Kelurahan Babakan Tarogong
- 3) Kelurahan Jamika
- 4) Kelurahan Babakan Asih
- 5) Kelurahan Suka Asih

1. Keadaan Penduduk

Jumlah Kepala Keluarga : 34.871 umpi

Jumlah Penduduk :

Laki-laki : 62.485 jiwa

Perempuan : 60.567 jiwa

Jumlah : 123.052 jiwa

Jumlah Penduduk menurut kewarganegaraan :

WNI Pribumi : 123.051 orang

WNA : 1 orang

Jumlah Penduduk menurut Golongan Agama :

Islam : 103.548 Orang

Kristen : 12.586 Orang

Katholik : 6.034 Orang

Hindu : 64 Orang

Budha : 1.183 Orang

Aliran Kepercayaan : 43 Orang

Khonghucu : 58 Orang

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD) Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung , Kecamatan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

1.4 Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT RW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Penataan Organisasi Manajemen Publik (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan

masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah membangun sistem dan budaya pelayanan publik yang prima.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

2. Janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih

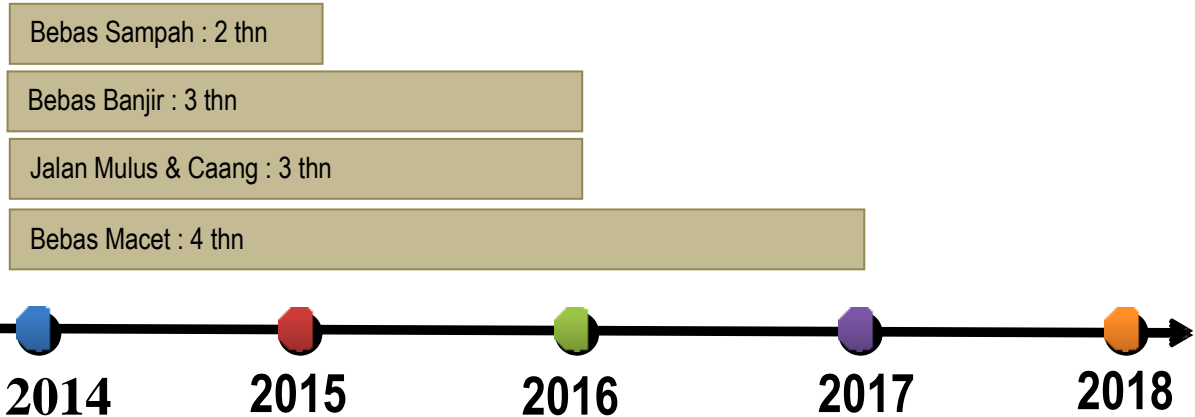
Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2013 - 2017 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut

Tabel 1.2
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No.	Aspek	Indikator
1	<i>BANDUNG SEHAT</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Kesehatan 2. <i>Ambulance</i> gratis 3. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa 4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
2	<i>BANDUNG RESIK</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun 3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun
3	<i>BANDUNG NYAMAN</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun
4	<i>BANDUNG SEJAHTERA</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Gambar 3.1
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Bandung Resik



Bandung Sehat

- Asuransi Kesehatan
- Ambulance gratis
- Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa
- Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

Bandung Nyaman

- Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW
- Penyediaan sarana air bersih
- Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni
- Bantuan 100 juta/RW/tahun
- Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun
- Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun

Bandung Sejahtera

- Menciptakan 100.000 wirausahawan
- Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru
- Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun
- Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah
- Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

1.5 Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1 Rencana Strategis Sebelum Revisi

Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Antapani Kota Bandung Nomor 800/026 – Kec. Atp Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dibuat

pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2017-2018 sesuai dengan Revisi Renstra Kecamatan Bojongloa Kaler adalah : **“Mewujudkan Kecamatan Bojongloa Kaler Sebagai Wilayah Pemukiman Yang Berwawasan Lingkungan, Menciptakan Pemerintah Yang Kredibel , Professional Dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat”**

1. Misi

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Bojongloa Kaler mempunyai Misi sebagai Berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)
2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan yang efektif, transparan, dan akuntabel

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Tabel 2.1
TUJUAN

Misi	Tujuan
1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)	1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayan Publik di Kecamatan dengan Membangun Sistem dan Budaya Pelayan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)
2 Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Adapun untuk indikator Tujuan nya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayan Publik di Kecamatan dengan Membangun Sistem dan Budaya Pelayan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil), indikator dari tujuan 1 ini adalah :
 - a. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
 - b. Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
 - c. Prosentase RW Juara

d. Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

a. Nilai Evaluasi AKIP

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sasaran dari tujuan 1
a. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.
Sasaran dari tujuan 2
a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

2.1.2 Rencana Strategis Setelah Revisi

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dengan adanya revisi RPJMD maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bojongloa Kaler setelah Revisi menjadi berikut

MISI :

MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG JUARA (JUJUR, UNGGUL, AMANAH, RAMAH DAN ADIL)

TUJUAN :

Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)

Sasaran dari tujuan setelah Revisi RPJMD di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Tabel 2.2
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bojongloa Kaler Setelah Revisi RPJMD

Tujuan	Sasaran
1. Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung setelah Revisi Renstra adalah sebanyak 2 (Dua) indikator sedangkan setelah Revisi RPJMD Indikator pada masing masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Setelah Revisi RPJMD

Sasaran	Indikator Kinerja
1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2018 - 2018 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan revisi RPJMD terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan Revisi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil revisi tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kaler Tahun 2018.

Hasil revisi pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indicator kinerja pada seluruh sasaran, selain berkurangnya jumlah indicator juga merevisi penempatan indicator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kaler Tahun 2018 - 2018.

1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung

- Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.
- Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.

2. Rekomendasi Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
- Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan
- Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya
- Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja
- Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.

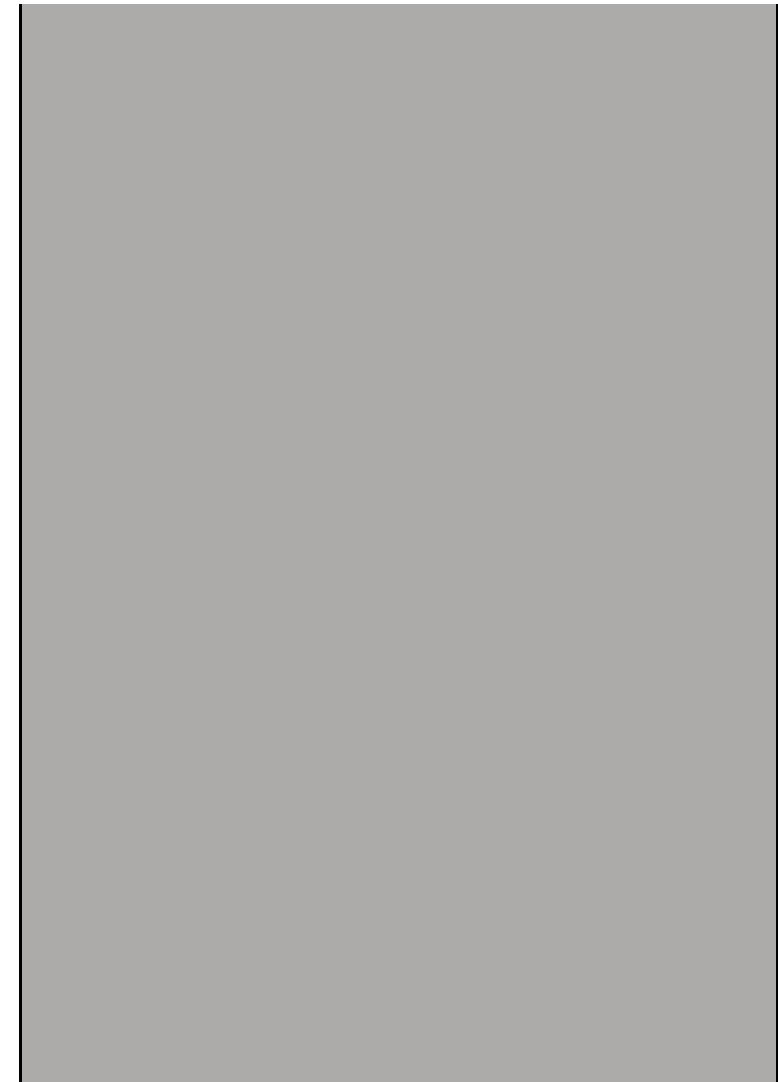
Berdasarkan hasil revisi dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
sebelum rewiu dan setelah revisi
Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	SEBELUM REVISI	SEBELUM REVISI							TUJUAN	SASARAN	SETELAH REVISI						
			INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN							INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
						2014	2015	2016	2017	2018					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan	1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan	1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	71,25	80,2	80,7	83,5	82	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan	1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai				80	82,8

				1. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	60	75	80	85	90
			2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan	2. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	60	75	80	85	90
				3. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	25	50	75	100	100
				4. Persentase RW Juara	%	30,77	51,92	65,38	78,85	92,31
		2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan								



1.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bojongloa Kaler

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan disusun program-program pembangunan. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Bandung No. 542/2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan, Kecamatan Bojongloa Kaler melaksanakan beberapa Program, diantaranya

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
6. Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan
7. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Program yang disajikan di dalam LKIP adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan dan Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan saja, dimana penyusunan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan alur atau mekanisme perencanaan mulai dari

MUSRENBANG hingga penetapan skala prioritas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.1.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 050/Kep.966-Orpad/2013 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bojongloa Kaler adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.5

Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bojongloa Kaler 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sesuai amanat UU no.25/2009 tentang pelayanan publik dan PP 19/2008 tentang kecamatan maka kecamatan sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat kecamatan	Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat dan SK Menpan No. 25/2004 <i>Rata Rata IKM Kecamatan dan Kelurahan</i>	Responden adalah penerima pelayanan publik kecamatan dan kelurahan pada tahun pengukuran. Responden secara acak berstrata mewakili jumlah kelurahan dan jenis pelayanan di lingkungan kecamatan
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Pemberdayaan Masyarakat menjadi Tupoksi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1407 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD) dan menjadi IKU Karena tercantum dalam Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Mengenai Program PIPPK	% Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF	Sesuai Kriteria RW Juara, Kriteria LKK Aktif dan Kriteria Siskamling Aktif

2.1.3 Rencana Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	82,8
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	85

Adapun Bila dilihat Rencana Kinerja Tahunan 2018-2018 Kecamatan Bojongloa Kaler Setelah dilakukannya Revisi RENSTRA Kecamatan sebagai konsekuensi adanya perubahan RPJMD Kota Bandung menjadi Sebagai Berikut :

Tabel 2.7
Rencana Kinerja tahunan 2018- 2018
Kecamatan Bojongloa Kaler hasil Revisi Renstra

TUJUAN	SASARAN	SETELAH REVISI						
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai				80	82,8
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%				75	85

2.1.4 Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2016 mengacu pada dokumen Renstra Revisi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2018-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Hasil Revisi
Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR-GET	RENCANA ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,8	8.901.777.267
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	85	4.450.001.960

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Bojongloa Kaler.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung
Tahun 2018**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Merah
2	Baik	75.00 – 89.99	Merah
3	Cukup	65.00 – 74.99	Merah

4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Bojongloa Kaler Tahun 2018, hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bojongloa Kaler berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor :, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor tanggal dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung juga melakukan revidi terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam

melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82.8	82.8	100.00
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	85	85	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dengan capaian kinerja 100 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kaler, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82.8	82.8	100.00
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	85	85	100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	0.00 %
2	Sesuai Target	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00
2	Misi 2	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	2	
1	Melebihi/Melampai Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	2	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	0	
1	Melebihi/Melampai Target		0.00 %
2	Sesuai Target		0.00 %
3	Tidak Mencapai Target		0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung tahun 2014-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79.95	79,95	100.00	80	80	100.00	80	80	100.00	80	80	100.00	82.8	82.8	100.00

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar 82.8 dari target sebesar 82.8 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Bojongloa Kaler maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

Sasaran 2

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%			0.00			0.00			0.00	75	75	100.00	85	85	100.00

Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" adalah sebesar 85 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Bojongloa Kaler maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan salah satu pertanggung jawaban tahunan, guna menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2016 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yaitu realisasi sebesar Rp. 7.275.724.688 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 7.807.732.637 atau 93,19% dengan pencapaian sasaran organisasi sebesar 103,54 % dari total anggaran yang dialokasikan.

Sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat yaitu realisasi sebesar Rp. 7.306.673.308 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.

7.411.062.045 atau 98,59% dengan pencapaian sasaran organisasi sebesar 113,44 % dari total anggaran yang dialokasikan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi *Memuaskan*. Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 14.724.433.465,00- atau 98,30% dari anggaran sebesar Rp. 14.976.620.613,00-.

Dalam tahun 2018 tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 23.053.865.526 (meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung) secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 18 Januari 2019
CAMAT BOJONGLOA KALER

EKA TAOFIK HIDAYAT, SSTP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19780926 199703 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT., karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2018.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian kekurangan dan kelemahan yang masih terdapat dalam dokumen pelaporan ini tidak berarti bahwa kami tidak akan dapat mencapai kinerja yang diharapkan, tetapi dari keadaan ini kami mempunyai keyakinan dan optimis, bahwa segala kekurangan dan permasalahan akan dapat diatasi dengan bekerja lebih keras lagi, yang pada gilirannya akan tercipta kinerja organisasi yang tinggi.

Akhirnya kami berharap semoga Allah SWT. selalu melindungi dan memberikan petunjuk pada jalan yang diridoiNya serta memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 18 Januari 2019

CAMAT BOJONGLOA KALER

EKA TAOFIK HIDAYAT, SSTP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19780926 199703 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan paradigma dari *stering* kepada *empowerment* seperti kondisi dewasa ini, telah menuntut aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara prima. Kondisi demikian tidak hanya dipengaruhi oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah semata, terutama pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun lebih dari itu, dipacu pula oleh tuntutan eksternal yang mengharuskan aparatur pemerintah memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam mendorong peningkatan pelayanan masyarakat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Arah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta tuntutan era global yang semakin dominan memerlukan tersedianya aparat pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Sementara itu kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai representasi pembuat buah karyanya.

Pada sisi pemerintah yang kompetitif tersebut, pemberian otonomi luas kepada Kabupaten/Kota dimaksudkan agar masing-masing Kabupaten/Kota secara otonom mampu mengemas diri untuk memasuki era kompetisi. Dalam konteks kompetisi itulah kemampuan kompetitif pemerintah ditentukan oleh tersedianya sumberdaya manusia aparatur yang profesional dan berkualitas.

Untuk itu Kecamatan Bojongloa Kaler harus memiliki Visi dan Misi karena dengan adanya visi diharapkan langkah operasional selanjutnya dapat dibuat dengan mengacu pada Visi Organisasi yang telah disusun, dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung yang akan datang, adapun Visi Kecamatan Bojongloa Kaler adalah :

Visi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : **“Mewujudkan** Kecamatan Bojongloa Kaler Sebagai Wilayah Pemukiman Yang Berwawasan Lingkungan, Menciptakan Pemerintah Yang Kredibel , Professional Dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat”

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Bojongloa Kaler mempunyai Misi sebagai Berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)

Penyampaian LKIP ini merupakan salah satu pertanggung jawaban tahunan, guna menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.